

PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Panitia Pelaksana dapat menerbitkan buku panduan Pelaksanaan RAKORNIS Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian tahun 2006.

Buku panduan ini dibuat sebagai pedoman bagi para peserta dalam mengikuti RAKORNIS Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian seluruh Indonesia tahun 2006, yang berisi antara lain : organisasi persidangan, jadwal acara, tata tertib dan daftar peserta.

RAKORNIS Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian ini diselenggarakan dari tanggal 5 – 7 September 2006 di Inna GRAND BALI BEACH Hotel, dengan harapan semoga RAKORNIS ini dapat terselenggara dengan lancar serta bermanfaat bagi para peserta dan masyarakat pada umumnya.

Pada kesempatan ini Panitia Pelaksana mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada pihak-pihak yang telah ikut berperan serta sejak dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan Rakornis ini.

Selanjutnya tak lupa pula Panitia menyampaikan permohonan maaf sekiranya dalam Pelaksanaan Rakornis ini banyak terdapat kekurangan.

Demikian disampaikan dan Selamat mengikuti Rakornis.

Denpasar, 5 September 2006

**PANITIA
RAKORNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DAN
PERKERETAAPIAN TAHUN 2006**

TTD

KETUA PANITIA

A. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah yang diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah disempurnakan dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 serta PP 25 Tahun 2000 yang dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan. Meskipun demikian berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka perwujudan pelaksanaan otonomi sesuai amanat UU & PP di atas, diantaranya dengan telah dikeluarkannya berbagai kebijakan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut.

Namun demikian dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kebijakan dari pemerintah daerah yang masih belum sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga masih menimbulkan banyak kendala.

Oleh karena itu untuk meng-eliminir hal tersebut perlu adanya forum diskusi guna membangun persamaan persepsi yang dapat dilakukan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian Tahun 2006.

Rakornis tersebut merupakan kelanjutan dari Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan Rakornis tahun ini akan difokuskan pada upaya peningkatan keselamatan, efisiensi dan kualitas pelayanan Transportasi Darat.

B. MAKSUD TUJUAN

Secara umum maksud dan tujuan penyelenggaraan Rakornis ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan transportasi darat melalui pembinaan teknis secara berkesinambungan terhadap para pejabat yang melaksanakan tugas-tugas operasional dilapangan, khususnya dalam rangka :

1. Mendapatkan masukan dari pemerintah daerah tentang hal – hal yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat pada sub sektor transportasi darat.
2. Menemukenali permasalahan-permasalahan dilapangan dan merumuskan langkah tindak lanjut pemecahannya

C. TEMA

Tema dalam Rakornis tahun 2006 ini disesuaikan dengan perkembangan kebijakan di dalam negeri dan pelaksanaannya di lapangan, untuk itu tema yang dicanangkan adalah :

“Peningkatan Konsolidasi dan Kebersamaan dalam Penyelenggaraan Transportasi Darat”

D. PENYELENGGARAAN RAKORNIS

1. Waktu dan Tempat

Rakornis dilaksanakan pada tanggal 5 – 7 September 2006 bertempat di Inna Grand Bali Beach Hotel. Jalan Hang Tuah No. 1 Sanur Bali Telpn (0361) 288511, Fax (0361) 288459.

2. Fasilitas yang disediakan :

- a. Akomodasi bagi peserta;
- b. Fasilitas ruang Sidang;
- c. Perlengkapan untuk peserta berupa tas berisi materi dan alat tulis;
- d. Konsumsi selama Rakornis;
- e. Pelayanan kesehatan ringan;

3. Fasilitas yang tidak ditanggung Panitia :

- a. Biaya penggunaan Fax atau telepon;
- b. Permintaan Akomodasi/konsumsi dan lain-lain diluar yang telah disediakan Panitia;
- c. Mini Bar, Permintaan Laundry dan fasilitas lain yang tidak termasuk pelayanan hotel;
- d. Kehilangan barang milik Hotel (Handuk, Selimut, Bed Cover, Kunci Kamar, Teko dll);

4. Pendaftaran Peserta

Para peserta Rakornis sudah harus melapor kepada panitia :

Hari / Tanggal : Selasa, 5 September 2006

Pukul : 12.00 – 18.00 WITA

Tempat : Inna Grand Bali Beach Hotel

Jl. Hang Tuah No.1 Sanur - Bali

Telp. (0361) 288511,

Fax (0361) 288459

5. Pembicara

Pembicara yang akan mengisi acara Rakornis teknis adalah :

a. Kalangan Akademisi :

Prof.Dr. Soetanto Suhodo, M.Sc

b. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi)

Ir. Edy Santana, MT

c. Direktur Keselamatan Transportasi Darat :

Drs. Suripno, MsTr

d. Sekreteris Direktorat Jenderal Perkeretaapian :

Ir. Nugroho Indrio

e. Direktur Transportasi Bappenas :

Ir. U.Hayati M.Sc

f. Badan Pembina Pensiunan Pegawai Perhubungan (BP3) :

H. M. Hoezein Hardjowijoto dan

Drs. Freddy T. Rorimpandey, MM

6. Peserta Rakornis

Peserta Rakornis terdiri dari unsur-unsur :

a. Ditjen Perhubungan Darat;

b. Ditjen Perkeretaapian;

- c. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi;
- d. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota;
- e. BUMN di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
- f. BUMN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
- g. Kapuslitbang Darat;
- h. Ketua STTD;
- i. Kepala UPT di lingkungan Ditjen Hubdat;
- j. Kepala UPT di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
- k. Kepala Pusdiklat Perhubungan Darat;
- l. Kepala Balai Transjaya Tegal;
- m. Kepala Balai Diklat Phb. Darat Bali
- n. Kepala Balai Diklat LLASDP Palembang;
- o. Unit Kerja di lingkungan Dephub.

E. ACARA

Secara garis besar acara yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Pembukaan dan Pengarahan oleh Menteri Perhubungan.
2. Pengarahan Umum oleh Dirjen Hubdat dan Dirjen KA;
3. Ceramah dari kalangan Akademisi, Apeksi, Direktorat KTD, Sesditjen Perkeretaapian, Bappenas dan BP3 Perhubungan.
4. Sidang Komisi;
5. Sidang Pleno dan Penutupan.

Susunan Acara Rakornis Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian sebagaimana dalam lampiran I.

F. TATA TERTIB PENYELENGGARAAN RAKORNIS

1. Panitia Pelaksana menerima pendaftaran peserta mulai pukul 12.00 WIT pada Hari Selasa tanggal 5 September 2006.
2. Peserta menginap di Inna Bali Beach Hotel atau hotel lain yang direkomendasikan oleh Panitia.
3. Hadir 15 menit di ruang sidang sebelum acara dimulai.
4. Mengisi daftar hadir yang disediakan Panitia.
5. Berpakaian Dinas Harian lengkap dan menggunakan tanda pengenal yang disediakan Panitia, selama kegiatan dan berpakaian batik pada acara pembukaan.
6. Selama kegiatan berlangsung, peserta dilarang meninggalkan ruang Rakornis/sidang kecuali mendapat ijin dari Panitia.
7. Menjaga kebersihan lingkungan dan tidak merokok di ruang Rakornis/sidang.
8. Memberitahukan kepada Panitia apabila berhalangan hadir.
9. Menjaga ketertiban dan ketenangan selama Rakornis berlangsung.

G. TATA TERTIB PERSIDANGAN

1. Pembagian Komisi

Jumlah komisi direncanakan dibagi menjadi 4 (empat), yang terdiri dari :

- a. Komisi I : Bidang LLAJ dan Keselamatan Jalan
- b. Komisi II : Bidang Transportasi Perkotaan
- c. Komisi III : Bidang LLASDP
- d. Komisi IV : Bidang Perkeretaapian

2. Organisasi Persidangan

- a. Organisasi persidangan terdiri dari :
 - 1) Ketua Sidang
 - 2) Sekretaris
 - 3) Anggota
 - 4) Nara Sumber
 - 5) Notulen
 - 6) Perumus
- b. Peserta yang telah disusun dalam keanggotaan komisi wajib mentaati keanggotaan tersebut, bagi unit organisasi yang mengirim peserta lebih dari 1 orang dapat menempatkannya pada komisi yang berbeda.

3. Materi Persidangan

Materi yang akan dibahas dalam sidang Komisi, meliputi :

- a. Materi persidangan yang disiapkan oleh Panitia ;
- b. Isu-isu menonjol yang sedang berkembang saat ini.

4. Mekanisme Persidangan.

- a. Sidang Komisi dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua Komisi dengan dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih oleh peserta dalam komisi, serta didampingi oleh Notulen, Tim Materi dan Nara Sumber.
- b. Pimpinan Sidang memaparkan beberapa isu yang akan dibahas dalam setiap Komisi, untuk mendapatkan tanggapan dari anggota Komisi.

- c. Dalam pembahasan setiap isu dimintakan tanggapan/ pendapat dari peserta.
- d. Tanggapan oleh para peserta disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan di daerahnya masing-masing.
- e. Pembahasan dan tanggapan pada setiap Sidang Komisi dicatat oleh Notulen dan dirumuskan bersama oleh Ketua Sidang dibantu oleh Tim Materi.
- f. Ketua Komisi berkewajiban mengendalikan dan mengarahkan jalannya Sidang agar diskusi tidak berkembang menyimpang dari pokok materi bahasan.
- g. Nara Sumber dan Tim Materi membantu memberikan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan materi bahasan dalam memperlancar pembahasan jalannya Sidang.
- h. Ketua Komisi berkewajiban membentuk Tim Perumus Komisi.
- i. Hasil perumusan komisi dilaporkan dalam Sidang Pleno yang dibacakan oleh Ketua komisi atau yang mewakili.
- j. Hasil akhir Sidang pleno disusun oleh Tim Materi beserta Notulen dan Tim Perumus komisi.

H. JUMLAH PESERTA DAN UNDANGAN RAKORNIS TAHUN 2006

1. PESERTA

Jumlah peserta yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan Rakornis tahun 2006 adalah 539 orang, yang terdiri dari :

- a. Dirjen Perhubungan Darat = 1 orang
- b. Dirjen Perkeretaapian = 1 orang

c.	Sesditjen / Para Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	= 5 orang
d.	Sesditjen / Para Direktur di lingkungan Ditjen. Perkeretaapian	= 4 orang
e.	Kapuslitbang Perhubungan Darat	= 1 orang
f.	Kapusdiklat Perhubungan Darat	= 1 orang
g.	Kepala Pusat Kajian Strategis PJP Dephub	= 1 orang
h.	Kepala Dishub/LLAJ Propinsi	= 33 orang
i.	Kepala Dinas Perhubungan Kota	= 91 orang
j.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten	= 349 orang
k.	Direksi BUMN (Damri, KA, ASDP)	= 4 orang
l.	Kepala Balai Di Lingkungan Ditjen Hubdat	= 3 orang
m.	Ketua STTD Bekasi	= 1 orang
n.	Kadivreg. PT. KA	= 4 orang
o.	Kadaop. PT. KA	= 9 orang
p.	Kepala UPT di lingk Ditjen Hubdat	= 4 orang
q.	Kepala UPT di lingk Ditjen Perkeretaapian	= 3 orang
r.	Pemimpin Cabang PT. ASDP	= 12 orang
s.	Para Pejabat Eselon III di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	= 6 orang
t.	Para Pejabat Eselon III di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	= 6 orang

2. UNDANGAN

Peserta undangan yang diharapkan hadir dalam Rakornis Tahun 2006 ini terdiri dari Instansi di lingkungan Departemen Perhubungan dan Instansi terkait yang mempunyai relevansi

langsung dalam upaya peningkatan kinerja, konsolidasi dan kebersamaan dalam penyelenggaraan transportasi darat.

Undangan terdiri dari :

- a. Menteri Perhubungan = 1 orang
- b. Sekjen Departemen Perhubungan = 1 orang
- c. Gubernur Bali = 1 orang
- d. Irjen Departemen Perhubungan = 1 orang
- e. Dirjen Perhubungan Laut = 1 orang
- f. Dirjen Perhubungan Udara = 1 orang
- g. Kabadan Litbang Dephub = 1 orang
- h. Kabadan Diklat Dephub = 1 orang
- i. Direksi BUMN di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dan Ditjen Perkeretaapian = 4 orang
- j. Kepala Biro Perencanaan Dephub = 1 orang
- k. Kepala Biro Keuangan Dephub = 1 orang
- l. Kepala Pusdatin Dephub = 1 orang
- m. Direktur Transportasi Bapenas = 1 orang
- n. DPP Organda = 1 orang
- o. Gapasdap = 1 orang
- p. Maska = 1 orang
- q. PT. Jasa Raharja = 1 orang
- r. PT. Jasa Raharja Putera = 1 orang
- s. Wartawan = 10 orang

LAMPIRAN - LAMPIRAN

SUSUNAN ACARA
RAKORNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT & PERKERETAAPIAN
TANGGAL 5 s/d 7 SEPTEMBER 2006
INNA GRAND BALI BEACH HOTEL

NO.	HARI/TGL	JAM	KEGIATAN/ACARA	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB
		WITA			
	Selasa 5 Sept. '06	12.00-18.00	Registrasi Peserta	Lobby Inna Bali Beach Hotel	Bid. Akomodasi
		19.00-selesai	Penyambutan Kedatangan Lagu Indonesia Raya Laporan Ketua Panitia Sambutan selamat datang oleh Gubernur Bali Sambutan dan pengarahan serta Pembukaan Rakornis oleh Menteri Perhubungan Pembacaan doa Ramah tamah, Kunjungan Pameran, Makan malam dan Hiburan	Agung Room (Pakaian Batik lengan panjang)	Bidang: Acara, Humas MC : Pemda Prop. Bali Pemda Propinsi Bali

NO.	HARI/TGL	JAM	KEGIATAN/ACARA	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB
		WITA			
	Rabu 6 Sept. '06	06.00-07.30	Makan pagi	Bali Coffe Shop	Bid. Konsumsi
		07.30-09.00	Hymne Perhubungan Pengarahan umum oleh Dirjen Hubdat Pengarahan umum oleh Dirjen Perkeretaapian Dilanjutkan dengan tanya jawab Moderator : Direktur LLAJ	Agung Room	Bidang: Acara, Sekretariat, Materi
		09.00-09.30	Rehat kopi	Canopy Agung Room	Bid. Konsumsi
		09.30-12.30	Diskusi Panel 1. Ceramah oleh Akademisi 2. Ceramah oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 3. Ceramah oleh Direktur Keselamatan Transportasi Darat 4. Ceramah oleh Sesditjen Perkeretaapian Dilanjutkan dengan tanya jawab Moderator : Kepala Biro Hukum Departemen Perhubungan	Agung Room	Bidang: Acara, Sekretariat, Materi

NO.	HARI/TGL	JAM	KEGIATAN/ACARA	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB
		WITA			
	Rabu 6 Sept. '06	12.30-13.00	Pembagian komisi Setditjen Hubdat, didampingi Sesditjen KA dan Ketua Panitia.	Agung Room	Bidang: Acara, Sekretariat, Materi
		13.00-14.00	ISHOMA	Canopy Agung Room	Bidang: Acara, Sekretariat, Materi
		14.00-15.30	Sidang Komisi	Ruang Sidang Komisi	Bid. Konsumsi
		15.30-16.00	Rehat kopi	Ruang Sidang Komisi	Bid. Konsumsi
		16.00-17.30	Lanjutan sidang komisi s/d perumusan hasil sidang komisi	Ruang Sidang Komisi	Bidang: Acara, Sekretariat, Materi
		18.30-20.00	Makan Malam	Canopy Agung Room	Bid. Konsumsi
		20.00-selesai	Lanjutan Perumusan Hasil Sidang Komisi	Ruang Sidang Komisi	Bidang: Acara, Sekretariat, Materi

NO.	HARI/TGL	JAM	KEGIATAN/ACARA	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB
		WITA			
	Kamis 7 Sept. '06	06.00-08.00	Makan pagi	Bali Coffee Shop	Bid. Konsumsi
		08.00-08.20	Ceramah oleh Direktur Transportasi Bappenas (moderator: Dir. Teknik Prasarana Ditjen KA)	Agung Room	
		08.20-08.30	Tanya jawab		
		08.30-08.50	Ceramah oleh BP3 H. M. Hoezein Hardjowijoto dan Freddy T. Rorimpandey, MM Moderator : Dir. LLASDP	Drs. Agung Room	Bidang: Acara, Sekretariat, Materi
		08.50-09.00	Tanya jawab		
		09.00-10.30	Sidang Pleno dipimpin oleh Sesditjen KA didampingi oleh Sesditjen Hubdat. Laporan Komisi I : Bidang LLAJ dan Keselamatan Jalan Laporan Komisi II : Bidang Transportasi Perkotaan Laporan Komisi III : Bidang LLASDP Laporan Komisi IV : Bidang Perkeretaapian Sekaligus penyerahan hasil Komisi kepada Pimpinan Sidang Laporan Komisi I, II dan III diserahkan kpd Sesditjen Hubdat Laporan Komisi IV diserahkan kpd Sesditjen KA	Agung Room	Bidang: Acara, Sekretariat, Materi
		10.30-11.00	Rehat kopi	Canopy Agung Room	Bid. Konsumsi
11.00-11.05	Persiapan Penutupan Rakornis	Agung Room			

NO.	HARI/TGL	JAM	KEGIATAN/ACARA	TEMPAT	PENANGGUNG JAWAB
		WITA			
	Kamis 7 Sept. '06	11.05-11.35	<p>Penutupan Rakornis</p> <p>Pembacaan Perumusan Hasil Sidang oleh Ketua Tim Perumus I & II (Wakil dari daerah) <i>Ket: Tim perumus I (Bidang Transportasi Darat)</i> <i>Tim perumus II (Bidang Perkeretaapian)</i></p> <p>Penyerahan hasil rumusan dari Ketua Tim Perumus I kepada Dirjen Hubdat dan Ketua Tim Perumus II kepada Dirjen Perkeretaapian.</p> <p>Laporan Ketua Panitia</p> <p>Kesan dan Pesan Peserta</p> <p>Penutupan oleh Dirjen Hubdat</p> <p>Pembacaan Doa</p>	Agung Room	Bidang: Acara, Sekretariat, Materi
		11.35-selesai	Makan siang		Bid. Konsumsi

Keterangan :

Komisi I : Bidang LLAJ dan Keselamatan Jalan : Agung Room
 Komisi II : Bidang Transportasi Perkotaan : Legong Pendet Room
 Komisi III : Bidang LLASDP : Joget Kecak Room
 Komisi IV : Bidang Perkeretaapian : Bali Hai Room Lt.10

ORGANISASI PERSIDANGAN**Komisi I Bidang LLAJ dan Keselamatan Jalan**

- ◆ Ketua Sidang : Peserta
- ◆ Sekretaris : Eddy Gunawan, ATD, MEngSc.
- ◆ Anggota : Peserta
- ◆ Nara Sumber :
 1. Drs. Suroyo Alimoeso (Direktur LLAJ)
 2. Drs. Suripno, MStr. (Direktur KTD)
 3. Ir. Sugihardjo, MSi.
 4. Gde Pasek Suardika, MSc.
- ◆ Notulen :
 1. Made Suartika, ATD, MEngSc.
 2. Ahmad Yani, ATD, MT
- ◆ Perumus :
 1. Made Suartika, ATD, MEngSc.
 2. Ahmad Yani, ATD, MT
 3. Perwakilan Peserta
- ◆ Peserta :
 - Dephub
 1. Kepala Balai Diklat Trans JayaTegal
 2. Kepala Balai PLJSKB Bekasi
 3. Kapusdiklat Perhubungan Darat
 4. Kepala Balai Diklat Transportasi Darat Bali
 - Propinsi
 1. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Bali
 2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Bangka Belitung
 3. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DI.Yogyakarta
 4. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jambi
 5. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jawa Tengah
 6. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur
 7. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Barat
 8. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan
 9. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat
 10. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara
 - Kota
 1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar
 2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima
 3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar
 4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor
 5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon
 6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi
 7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri
 8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun
 9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang
 10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto
 11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagaralam
 12. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan
 13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh
 14. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
 15. Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo

16. Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga
17. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto
18. Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok
19. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi
20. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang
21. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Balai
22. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
23. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate
24. Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Kabupaten

1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Barat
2. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Barat Daya
3. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Besar
4. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Jaya
5. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Selatan
6. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Singkil
7. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang
8. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tengah
9. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tenggara
10. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Utara
11. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Agam
12. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Asahan
13. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Badung
14. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangka
15. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangka Barat
16. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangka Tengah
17. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangli
18. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banjarnegara
19. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul
20. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyumas
21. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barru
22. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Batang
23. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Belu
24. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bener Meriah
25. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkulu Selatan
26. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkulu Utara
27. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bireuen
28. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bondowoso
29. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Boyolali
30. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Brebes
31. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bungo
32. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ciamis
33. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Cianjur
34. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Cilacap
35. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Dairi
36. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya
37. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Dompu
38. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Garut
39. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gayo Lues
40. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gianyar
41. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gresik
42. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Grobogan
43. Kepala Dinas Perhubungan Kab. GunungKidul
44. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Humbang Hasuduntan
45. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Indragiri Hulu
46. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Indramayu

47. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karanganyar
48. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karawang
49. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karo
50. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kaur
51. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kebumen
52. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kediri
53. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kendal
54. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Mentawai
55. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepahiang
56. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Riau
57. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kerinci
58. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Klaten
59. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Konawe
60. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kuantan Singingi
61. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kudus
62. Kepala Dinas Perhubungan Kab. KulonProgo
63. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kuningan
64. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kupang
65. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Barat
66. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Selatan
67. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Tengah
68. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Timur
69. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lampung Utara
70. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Landak
71. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lebang
72. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lima Puluh Kota
73. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lumajang
74. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Luwu
75. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Magelang
76. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Magetan
77. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Majalengka
78. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Majene
79. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mamasa
80. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mamuju Utara
81. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mandailing Natal
82. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maros
83. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Merangin
84. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mukomuko
85. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nagan Raya
86. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ngawi
87. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias
88. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan
89. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pacitan
90. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Padang Pariaman
91. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pakpak Barat
92. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pamekasan
93. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pasaman
94. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat
95. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pati
96. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pelalawan
97. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pematang
98. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan
99. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pidie
100. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pinrang
101. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Polewali Mandar
102. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo
103. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Probolinggo

104. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Purbalingga
105. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Purworejo
106. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Rejang Lebong
107. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Rembang
108. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Rokan Hilir
109. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Samosir
110. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sampang
111. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sawahlunto Sijunjung
112. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seluma
113. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Semarang
114. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Serdang Bedagai
115. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Simalungun
116. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Simeuleu
117. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Situbondo
118. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sleman
119. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Solok
120. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Solok Selatan
121. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sorolangun
122. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sragen
123. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Subang
124. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sukabumi
125. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo
126. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumedang
127. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumenep
128. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabanan
129. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanah Datar
130. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanggamus
131. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat
132. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur
133. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Selatan
134. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tasikmalaya.
135. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Temanggung
136. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Timor Tengah Selatan
137. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Timor Tengah Utara
138. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Toba Samosir
139. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek
140. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tulungagung
141. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Wonogiri
142. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Wonosobo

Komisi II Bidang Transportasi Perkotaan

- ◆ Ketua Sidang : Peserta
- ◆ Sekretaris : Ir. Jamal Subastian, MSc.
- ◆ Anggota : Peserta
- ◆ Nara Sumber :
 1. Anton S. Tampubolon, SH (Direktur BSTP)
 2. Ir. Judiza R.Z, MSc.
 3. Ir. M. Tamzil
 4. Ir. Mulyadi Hadikusumo
 5. R. H. Christiono, MSc.
- ◆ Notulen :
 1. Torang Hutabarat, ATD, MM
 2. Sugianto, ATD, MM
- ◆ Perumus :
 1. Torang Hutabarat, ATD, MM
 2. Sugianto, ATD, MM
 3. Perwakilan Peserta
- ◆ Peserta :
 - Propinsi
 1. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Gorontalo
 3. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat
 4. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan
 5. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Tengah
 6. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Utara
 - Kota
 1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon
 2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan
 3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
 4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung
 5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
 6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam
 7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu
 8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi
 9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu
 10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai
 11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung
 12. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bontang
 13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukit Tinggi
 14. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon
 15. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar
 16. Kepala Dinas Perhubungan Kota Gorontalo
 17. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi
 18. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jaya Pura
 19. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari
 20. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang
 21. Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa
 22. Kepala Dinas Perhubungan Kota Lubuk Linggau
 23. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar
 24. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang
 25. Kepala Dinas Perhubungan Kota Manado

26. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram
27. Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro
28. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang
29. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang
30. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan
31. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya
32. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo
33. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu
34. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang
35. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pare-Pare
36. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman
37. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
38. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar
39. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak
40. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda
41. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sibolga
42. Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang
43. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong
44. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya
45. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang
46. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi
47. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tegal
48. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore
49. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tomohon

Kabupaten

1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Batang Hari
2. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Belitung
3. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bima
4. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Blitar
5. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Blora
6. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Boalemo
7. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bolaang Mongondow
8. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bombana
9. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bone
10. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bone Bolango
11. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buleleng
12. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buol
13. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Donggala
14. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Enrekang
15. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Fak fak
16. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gorontalo
17. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gowa
18. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai Utara
19. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jaya Wijaya
20. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jayapura
21. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kab.Tanah Laut
22. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kab.Tulung Agung
23. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Konawe Selatan
24. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kulon Progo
25. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Labuhan Batu
26. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lahat
27. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Langkat
28. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah
29. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tengah
30. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Manggarai
31. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Merauke

32. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Minahasa
33. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Minahasa Selatan
34. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Minahasa Utara
35. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Morowali
36. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim
37. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nganjuk
38. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pahuwato
39. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Parigi Moutong
40. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pegunungan Bintang
41. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Puncak Jaya
42. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta
43. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Rokan Hulu
44. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Soppeng
45. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Supiori
46. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabalong
47. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tana Toraja
48. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara
49. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tolikara
50. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Waropen

Dephub

1. Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat

Komisi III Bidang LLASDP

- ◆ Ketua Sidang : Peserta
- ◆ Sekretaris : Safrul Amiruddin, SE, MM
- ◆ Anggota : Peserta
- ◆ Nara Sumber :
 1. Drs. Ahmad Syukri (Direktur LLASDP)
 2. Hermanu, Msi.
 3. Ir. Amal Hamzah, MSc.
- ◆ Notulen :
 1. Ir. Fadli Arif, DESS
 2. Suyadi, SH
- ◆ Perumus :
 1. Ir. Fadli Arif, DESS
 2. Suyadi, SH
 3. Perwakilan Peserta
- ◆ Peserta :
 - Propinsi
 1. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Irian Jaya Barat
 2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Barat
 3. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah
 4. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kep. Riau
 5. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Maluku
 6. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Maluku Utara
 7. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Nusa Tenggara Barat
 8. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Nusa Tenggara Timur
 9. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Papua
 10. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Tenggara
 - Kota
 1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar Baru
 2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bau-bau
 3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang
 4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang
 5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan
 - Kabupaten
 1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Alor
 2. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Asmat
 3. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Balangan
 4. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai
 5. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kep.
 6. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangka Selatan
 7. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangkalan
 8. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banjar
 9. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantoeng
 10. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyuasin
 11. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banyuwangi
 12. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Kuala
 13. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan
 14. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Timur
 15. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Utara
 16. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Baru
 17. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Belitung Timur

18. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkalis
19. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bengkayang
20. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Berau
21. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Biak Numfor
22. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Boven Digoel
23. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba
24. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bulungan
25. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buru
26. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Buton
27. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ende
28. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Fak-fak
29. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Flores Timur
30. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Gunung Mas
31. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat
32. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Selatan
33. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Tengah
34. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Timur
35. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Utara
36. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai Selatan
37. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Hulu Sungai Tengah
38. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Indragiri Hilir
39. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jembrana
40. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jeneponto
41. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jepara
42. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kab Tanjung Jabung
43. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kaimana
44. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kampar
45. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kapuas
46. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kapuas Hulu
47. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karangasem
48. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karimun
49. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Katingan
50. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Keerom
51. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Aru
52. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Riau
53. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Sangihe
54. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Sula
55. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kep. Talaud
56. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ketapang
57. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Klungkung
58. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kolaka
59. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kolaka Utara
60. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Barat
61. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Timur
62. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kutai Barat
63. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kutai Timur
64. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lamandau
65. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lembata
66. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lingga
67. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lombok Barat
68. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lombok Timur
69. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur
70. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Luwu Utara
71. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Malinau
72. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tenggara
73. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maluku Tenggara Barat
74. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mamuju

75. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Manggarai Barat
76. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Manokwari
77. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mappi
78. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Melawi
79. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mimika
80. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Muaro Jambi
81. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Muna
82. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Murung Raya
83. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Musi Banyuasin
84. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Musi Rawas
85. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nabire
86. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Natuna
87. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ngada
88. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nunukan
89. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Ilir
90. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Komering Ilir
91. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Komering Ulu
92. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
93. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ogan Komering Ulu Timur
94. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Painai
95. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pangkajene Kepulauan
96. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pasir
97. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Penajam Paser Utara
98. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pontianak
99. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Poso
100. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau
101. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Raja Ampat
102. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Rote Ndao
103. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sambas
104. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sanggau
105. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sarmi
106. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sekadau
107. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Selayar
108. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat
109. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Timur
110. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seruyan
111. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Siak
112. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang
113. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sikka
114. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sinjai
115. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sintang
116. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sorong
117. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sorong Selatan
118. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sukamara
119. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumba Barat
120. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumba Timur
121. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa
122. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa Barat
123. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Takalar
124. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tanah Bumbu
125. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Tengah
126. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tapin
127. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tebo
128. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni
129. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Teluk Wondama
130. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tojo Una-una
131. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Toli-Toli

132. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tulang Bawang
133. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Wajo
134. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Wakatobi
135. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Way Kanan
136. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Yahukimo
137. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Yapen Waroppen

Dephub

1. Kepala Balai Diklat ASDP Palembang

PT. ASDP

1. Kepala PT. ASDP Cab. Bajoe
2. Kepala PT. ASDP Cab. Bakauheni
3. Kepala PT. ASDP Cab. Balikpapan
4. Kepala PT. ASDP Cab. Kayangan
5. Kepala PT. ASDP Cab. Ketapang
6. Kepala PT. ASDP Cab. Kupang
7. Kepala PT. ASDP Cab. Lembar
8. Kepala PT. ASDP Cab. Luwuk
9. Kepala PT. ASDP Cab. Merak
10. Kepala PT. ASDP Cab. Palembang
11. Kepala PT. ASDP Cab. Surabaya
12. Kepala Pel. Penyeb. Gorontalo
13. Kepala Pel. Penyeb. Kalabahi
14. Kepala Pel. Penyeb. Kariangu
15. Kepala Pel. Penyeb. Palembang
16. Dir. Usaha PT. ASDP

Komisi IV Bidang Perkeretaapian

- ◆ Ketua Sidang : Peserta
- ◆ Sekretaris : Ir. Harry Semedi
- ◆ Anggota : Peserta
- ◆ Nara Sumber :
 1. Ir. Nugroho Indrio, MSc. (Sesditjen Perkeretaapian)
 2. Ir. Sugiadi Waluyo (Direktur LLA KA)
 3. Ir. Hermanto Dwi Atmoko (Direktur Teknik Prasarana)
 4. Ir. Asril Syafei (Direktur Keselamatan dan Teknik Sarana)
- ◆ Notulen :
 1. Prih Galih, MT
 2. Ir. Titiek M. Agustriana, DEA
- ◆ Perumus :
 1. Prih Galih, MT
 2. Ir. Titiek M. Agustriana, DEA
 3. Perwakilan Peserta
- ◆ Peserta :
 - PT. KA
 1. ADM. TERM. PETI KEMAS GEDE BAGE
 2. ADM. TERM. PETI KEMAS RAMBI PUJI
 3. ADM. TERM. PETI KEMAS SOLO JEBRES
 4. Kepala DIVRE. III SUMATERA SELATAN
 5. Kepala DIVRE. II SUMATERA BARAT
 6. Kepala DIVRE. I SUMATERA UTARA
 7. Kepala DIVRE. JABOTABEK
 8. Kepala DAOPS I JAKARTA
 9. Kepala DAOPS II BANDUNG
 10. Kepala DAOPS III CIREBON
 11. Kepala DAOPS IV SEMARANG
 12. Kepala DAOPS IX JEMBER
 13. Kepala DAOPS V PURWOKERTO
 14. Kepala DAOPS VI YOGYAKARTA
 15. Kepala DAOPS VII MADIUN
 16. Kepala DAOPS VIII SURABAYA
 - Dephub
 1. Kepala Pusat Kajian Strategis, Setjen Dephub
 - Propinsi
 1. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Banten
 2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Bengkulu
 3. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Tengah
 4. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur
 5. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur
 6. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung
 7. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi NAD
 8. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Riau
 9. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan
 - Kota
 1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
 2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok
 3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai

4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang
8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta

Kabupaten

1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Timur
2. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bandung
3. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bekasi
4. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bogor
5. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bojonegoro
6. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Cirebon
7. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Deli Serdang
8. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Demak
9. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jember
10. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Jombang
11. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kutai Kertanegara
12. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lamongan
13. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lebak
14. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Madiun
15. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Malang
16. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mojokerto
17. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pandeglang
18. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pasuruan
19. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pekalongan
20. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Serang
21. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sidoarjo
22. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tangerang
23. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tegal
24. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tuban

TIM PERUMUS PLENO BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

- ◆ Ketua : Ir. Hotma P. Simanjuntak, MStr.
- ◆ Sekretaris : Eddy Gunawan, ATD, MEngSc.
- ◆ Anggota :
 1. Gde Pasek Suardika, MSc.
 2. Ir. Jamal Subastian, MSc.
 3. Ir. Judiza R.Z, MSc.
 4. Hermanu, MSi.
 5. Ir. Amal Hamzah, MSc.
 6. Ir. Sugihardjo, M.Si.
 7. Purwatiningsih, SH, MM
 8. Sugianto, ATD, MM
 9. Torang Hutabarat, ATD, MM
 10. Safrul Amiruddin, SE, MM
 11. Ir. Fadli Arif, DESS
 12. I Made Suartika, ATD, MEngSc.
 13. Ahmad Yani, ATD, MT
 14. Muiz Thohir, ST, MT
 15. Suyadi, SH

TIM PERUMUS PLENO BIDANG PERKERETAAPIAN

- ◆ Ketua : Ir. M. Zaki
- ◆ Sekretaris : Ir. Harry Semedi
- ◆ Anggota :
 1. Ir. Nico D. Djajasinga, MSc.
 2. Ir. Heru Sasongko, MSc
 3. Baitul Ichwan, SH, DEA
 4. Ir. Hendry Sendjata P.
 5. Ir. Achyar P, MSc.
 6. Ir. Harry W. Wiyono, MT.
 7. Ir. M. Nurcholis
 8. Ir. Triyono
 9. Ir. Prih Galih, MT
 10. Ir. Titiek M. Agustriana, DEA
 11. Suranto, ATD, MT.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.2384/UM.206/DRJD/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN
PANITIA PENYELENGGARA PERTEMUAN TEKNIS (RAKORNIS)
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DAN PERKERETAAPIAN SELURUH INDONESIA TAHUN 2006

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan transportasi darat, perlu dilakukan pembinaan teknis secara berkesinambungan terhadap para pejabat yang melaksanakan tugas-tugas operasional di lapangan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu penyelenggaraan pertemuan tahunan para Kepala UPT Sub Sektor Perhubungan Darat, Kepala Dinas Perhubungan Propinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, Kepala UPT Sub Sektor Perkeretaapian, PT. KAI (Persero) termasuk Kadaop dan Kadivre.
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pertemuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Pertemuan Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat seluruh Indonesia Tahun 2006 dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Negara Nomor 3493);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3527);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3528);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kapal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3724);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3777);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 4145);
16. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1979 jo. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1984 tentang Honorarium Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Anggota dan Tenaga Penasehat Ahli;
17. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERTEMUAN TEKNIS (RAKORNIS) BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DAN PERKERETAAPIAN SELURUH INDONESIA TAHUN 2006.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Pertemuan Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian seluruh Indonesia Tahun 2006 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggara Pertemuan tersebut dikum pertama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2006 dengan DIPA No. 0271.0/022-03.0/2006 dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2006 dengan DIPA No. 0872.0/022-08.0/-/2006 dan sumber dana lain yang memungkinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Kepada panitia penyelenggara pertemuan teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian Seluruh Indonesia Tahun 2006 diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut :
1. Ketua Pengarah sebesar Rp. 400.000,-
2. Anggota Pengarah sebesar Rp. 350.000,-
3. Panitia Pelaksana sebesar Rp. 300.000,-
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 04 Juli 2006

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ttd

ISKANDAR ABUBAKAR
NIP. 120 092 889

Tembusan :

1. Dirjen Perkeretaapian;
2. Sesditjen Perhubungan Darat;
3. Sesditjen Perkeretaapian;
4. Para Direktur di lingkungan Ditjen Hubdat;
5. Para Direktur di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
6. Kadishub Propinsi Bali;
7. Kadishub Bali;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : SK.2384/UM.206/DRJD/2006
TANGGAL : 04 Juli 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENYELENGGARA PERTEMUAN TEKNIS (RAKORNIS)
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DAN PERKERETAAPIAN
SELURUH INDONESIA TAHUN 2006

I. PENGARAH

1. Ketua I : Dirjen Perhubungan Darat
- Ketua II : Dirjen Perkeretaapian
2. Anggota :
 1. Sekretaris Ditjen Hubdat;
 2. Sekretaris Ditjen Perkeretaapian;
 3. Direktur LLAJ;
 4. Direktur LLASDP;
 5. Direktur BSTP;
 6. Direktur KTD;
 7. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan;
 8. Direktur Teknik Prasarana;
 9. Direktur Keselamatan dan Teknik Sarana.
 10. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Bali.

II. PANITIA PELAKSANA :

1. Ketua :
2. WK. Ketua I : Drs. Wijianto, Msi.
- WK. Ketua II : Ir. Heru Wisnu Wibowo, MSc
3. Sekretaris I : Sigit Irfansyah, MSc.
- Sekretaris II : Dadan M Ramdan, ATD, MSi
4. Bendahara I : Zainal Arifin, SE
- Bendahara II : Dra. Pratiwi

A. PANITIA PELAKSANA BID. MATERI, PERSIDANGAN DAN NOTULEN

1. Ketua : Ir. Hotma P. Simanjuntak, MSTR
- WK. Ketua : Ir. Heru Sasongko
2. Sekretaris : Edy Gunawan, MSc
3. Anggota :
 1. Ir. Sugihardjo
 2. Ir. Jamal Subastian, MSc
 3. Ir. Mulyadi Hadikusumo
 4. Purwatiningsih, SH, MM
 5. Gede Pasek Suardika, MSc
 6. Safrul Amiruddin, SE, MM
 7. Ir. Amal Hamzah, MSc
 8. Hermanu, MSi.
 9. Ahmad Yani, ATD, MT
 10. Muiz Tohir, ST, MT
 11. I Made Suartika, MSc
 12. Ir. Fadli Arif, DESS
 13. Torang Hutabarat, ATD, MSc
 14. Ir. Yudiza R.Z, MSc
 15. Suyadi, SH
 16. Sugianto, ATD, MM
 17. Ir. Moh. Zaki
 18. Ir. Nico Djayasinga, M.Sc
 19. Prih Galih, ST, MT
 20. Suranto, ATD, MT

B. PANITIA PELAKSANA BIDANG ACARA DAN PROCEEDING

1. Ketua : R.H. Christiono, MSc
WK. Ketua : Baitul Ihwan, SH, DESS
2. Sekretaris : Dra. Sari Catur Lestari
3. Anggota :
 1. Sugeng Sugiarto, SH
 2. Ketut Suhartana, S.Sit, MT
 3. Ir. Jaya Sakti
 4. Drs. I Wayan Suta
 5. Ir. Betsy Halah Surti
 6. Dra. Akda Nuraini, MM
 7. Dwi Siwi S
 8. Jumanto, SPd.
 9. Hartono, SE

C. PANITIA PELAKSANA BIDANG TRANSPORTASI DAN PERJALANAN

1. Ketua : Abyad Agus Salim, SH
2. Sekretaris : Drs. Subroto
3. Anggota :
 1. Drs. Firdaus Rasyad, MM
 2. Hadi Setiabudi P, S.Sit
 3. Kusnanto Hadi, SE
 4. Robin Maulana P
 5. Ir. Harry W. Wiyono, MStr
 6. I Made Rai Ridartha, MSc
 7. Tofan Prianto, ATD, MT
 8. Ngurah Wijaya, SE
 9. I Made Suardika, SH

D. PANITIA PELAKSANA BIDANG AKOMODASI DAN KONSUMSI

1. Ketua: Eron Sinaga, SE
2. Sekretaris : Irlly Saritini, ST
3. Anggota :
 1. Dra. Budiningsih
 2. Hari Putranto, SE, MT
 3. I Gede Putu Sunarta, SE, MM
 4. I Gede Nyoman Ary Dharma S, MT
 5. Irine P.S, SE.
 6. Drs. Sugito
 7. Mulia PAS
 8. Titik Budiarsih
 9. Hardiyanto
 10. Putu Astika, SE
 11. Muhadi.
 12. Zainal Abidin.

E. PANITIA PELAKSANA BIDANG SEKRETARIAT

1. Ketua : Drs. Dede Sudiatna
2. Sekretaris : Ni Widaningsih, SE
3. Anggota :
 1. Ir. Sri Hardianto
 2. Tofan Muis, SE
 3. Avi Mukti, S.Sit
 4. Panji Firdaus, AMD, LLASDP
 5. Christanto
 6. Karyono, AMD (Paramedis)
 7. Suhardi

F. PANITIA PELAKSANA BIDANG HUMAS DAN PELIPUTAN

1. Ketua : Drs. Joko Soelaksono
2. Sekretaris : Suprpto, ATD, SE, DESS
3. Anggota :
 1. Bambang Djati S.
 2. Arif Puntoko

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ISKANDAR ABUBAKAR
NIP. 120 092 889

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR :
TANGGAL :

URAIAN TUGAS PANITIA PENYELENGGARA PERTEMUAN TEKNIS (RAKORNIS) BIDANG PERHUBUNGAN DARAT DAN PERKERETAAPIAN SELURUH INDONESIA TAHUN 2006

1. PENGARAH

Memberikan arahan kepada panitia Pelaksana dalam penyelenggaraan pertemuan agar dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

2. PANITIA PELAKSANA

Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris mempunyai tugas memimpin terhadap segala kegiatan yang dilakukan setiap bidang dalam mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pertemuan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Pengarah dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengarah.

A. BIDANG MATERI, PERSIDANGAN, DAN NOTULEN

Mempunyai tugas menyiapkan kerangka acuan materi pemaparan para penceramah, materi persidangan, bertidak sebagai nara sumber dalam sidang-sidang komisi, melakukan pencatatan selama berlangsungnya pembahasan dalam persidangan, dan membuat risalahnya serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua panitia pelaksana.

B. BIDANG ACARA DAN PROCEEDING

Mempunyai tugas menyiapkan buku panduan pertemuan dan menyusun acara pertemuan, mengatur dan mengendalikan jalannya acara selama pertemuan berlangsung, menyiapkan acara hiburan, dan merumuskan hasil-hasil pertemuan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua panitia pelaksana.

C. BIDANG TRANSPORTASI DAN PERJALANAN

Mempunyai tugas menyiapkan rencana kebutuhan sarana transportasi sebelum dan sesudah pertemuan dilaksanakan, mengorganisir penyediaan transportasi serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua panitia pelaksana.

D. BIDANG AKOMODASI DAN KONSUMSI

Mempunyai tugas mempersiapkan perlengkapan dan kelengkapan sarana dan prasarana pertemuan, mempersiapkan komisi, melakukan registrasi kehadiran peserta pertemuan, dan mempersiapkan konsumsi serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua panitia pelaksana.

E. BIDANG SEKRETARIAT

Mempunyai tugas mempersiapkan surat menyurat dan ATK, undangan-undangan, mengurus perijinan, pengetikan bahan dan materi hasil pertemuan, penggandaan dan pendistribusian hasil pertemuan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua panitia pelaksana.

F. BIDANG HUMAS DAN PELIPUTAN

Mempunyai tugas mempersiapkan bahan pengarahan pimpinan pada pembukaan dan penutupan, melakukan publikasi pelaksanaan pertemuan baik melalui media cetak maupun elektronik dan memberikan informasi yang akurat kepada seluruh peserta, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua panitia pelaksana.

